

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan negara yang didambakan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah berjalan dengan lancar, namun dalam praktiknya ditemukan perilaku oportunistik seperti tindakan korupsi yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Tindakan korupsi memberikan dampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan serta dapat meningkatkan jumlah kemiskinan sehingga hal ini akan mengganggu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan indikasi korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan indikasi korupsi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK, dan website resmi BPS. Penelitian ini dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2020. Penentuan sampel menggunakan metode metode sensus dan diperoleh 70 sampel pemerintah daerah.

Data penelitian ini diolah menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan indikasi korupsi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: indikasi korupsi, kesejahteraan masyarakat, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.